

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, 1993, *Menguak Tabir Hukum Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Andrew Hick dan SH Goo, 1994, *Cases and Materials on Company Law*, ISE, London.
- Djafar Saidi, Muhammad, 2021, *Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik*, Rajagrafindo Persada, Depok.
- F. Sjawie, Hasbullah, 2017, *Direksi Perseoran Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta.
- Frans Satrio Wicaksono, 2009, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbataas*, Visimedia, Malang.
- Fuady, Munir, 2014, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gatot Supramono, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2019, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2020, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Huda, Chairul, 2015, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Ilmar, Aminuddin, 2012, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Kadir, Abdul, 2018, *Menyelamatkan Wakil Tuhan Memperkuat Peradn dan Kedudukan Hakim*, Merdekabook, Jakarta.
- Khairandy, Ridwan, 2006, *Pengantar Hukum Dagang*, FH UII PRESS, Yogyakarta.
- _____, 2009, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.

- _____, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, FH UII Press, Yogyakarta.
- M. Scheb, John, 1999, *Criminal Law Second Edition*, Washington: Wadsworth Publishing Company.
- Manan, Bagir, 2007, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU No. 4 Tahun 2004*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Marbun, S.F., dan Moh. Mahfud M.D., 2011, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maria, S.W. Sumardjono, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2015, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, Dan Permasalahannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2021, *Membangun Model Ideal Pemidanaan Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan*, Kencana, Jakarta.
- Mulyana, Asep N., 2020, *Dimensi Koruptif Kebijakan (Pejabat) Publik: Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Mustafa, Bachsan, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nirwanto, D. Andhi, 2013, *Dikotomi Terminologi Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Aneka Ilmu Putra, Semarang.
- Nur Dewanta, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Nurdin, Andriani, 2012, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, PT Alumni, Bandung.
- Pramono, Nindyo, 2013, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Prasetio, 2017, *Dilema BUMN: Benturan Penerapan Business Judgement Rules (BJR) dalam Keputusan Direksi BUMN*, Rayyana, Jakarta.
- Prayoko, Robert, 2015, *Doktrin Business Judgement Rule*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Priyo Gunarto, Marcus, 2007, *Perkembangan Unsur Delik Korupsi*, Marginal Press, Yogyakarta.
- _____, 2018, *Dekonstruksi Putusan Bebas & Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2004, *Menuju Produk Hukum Progresif* dalam buku *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Ahmad Gunawan dan Muammar Ramadhan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rai Wijaya, I.G, 2002, *Hukum Perseroan Terbatas*, Kesain Blanc, Jakarta.
- Rifai, Ahmad, 2020, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sadhi Astuti, Made, 1997, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, IKIP Malang, Malang.
- Seno Adji, Indriyanto, 2012, *Korupsi dan Permasalahannya*, Diadit Media, Jakarta.
- Setiawan Boen, Hendra, 2008, *Bianglala Business Judgement Rule*, PT. Tatanusa, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2018, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suteki, 2021, *Hukum Dan Masyarakat*, Thafa Media, Yogyakarta.

Syamsudin, M., 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta.

Tjandra, W. Riawan, 2013, *Hukum Keuangan Negara*, PT Grasindo, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zulmawan, Wawan, 2019, *Business Judgement Rule BUMN*, Jala Permata Aksara, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 387) Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297).

C. Karya Ilmiah

Affandhi, Frans *et al*, "*Business Judgement Rule* dikaitkan dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Direksi Badan Usaha Milik Negara

Terhadap Keputusan Yang di Ambil”, *USU Law Journal*, Vol. 4, No. 1, Januari 2016.

Affandhi, Frans, 2015, “*Business Judgement Rule* Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Terhadap Keputusan Bisnis yang Diambil”, *Tesis*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Asril, Juli, “Pertanggungjawaban Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit” *LPPM STIE Muhammadiyah Bandung*, Vol. 2 No. 1 Januari – April 2018.

Desiputri Hadi, Shigeko, “Prinsip *Business Judgement Rule* dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi BUMN Yang Melakukan Tindak Investasi Yang Mengakibatkan Kerugian”, *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 4, No. 2, Juni 2021.

Jeane Sugiharto, Antonia, “Kerugian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Kerugian Keuangan Negara”, *Jurnal Education and Development*, Vol. 9 No. 1, Februari 2021.

Kapitan Smaud Natun, Julio Thimotius, “Status Kepemilikan Anak Perusahaan BUMN” *Mimbar Keadilan* Vol. 12 No. 1 Februari-Juli 2019.

Maryanto, 2013, *Tanggung Jawab Direksi dalam Pengurusan BUMN yang di Restrukturisasi*, Tesis.

Nanda Lestari, Sartika, “*Business Judgement Rule* Sebagai *Immunity Doctrine* Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia”, *Jurnal Notarius*, Vol. 8, No. 2, September 2015.

Pidato Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej pada acara bedah buku berjudul *Eksaminasi Terhadap Putusan Irman Gusman*, pada tanggal 22 Januari 2019 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Raffles, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2020.

Sesara Amir, Gita Wanda, “Konsep Penerapan Prinsip *Business Judgement Rule* Pada Keputusan Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)”, *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Volume 1 Nomor 1 Maret 2020.

Soerita Atmadja, Arifin P., “Kritik Yuridis Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 1 Nomor 2 Desember 2004.

Supandriyo, 2018, “Asas Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Dengan Ancaman Minimum Khusus”, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Syarif Hayyi, Muh. Akram, 2021, “Penerapan Doktrin *Business Judgement Rule* Terhadap Keputusan Direksi BUMN Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.

Warta Pemeriksa, “Mengejar Kerugian Negara”, *Badan Pemeriksa Keuangan*, Vol III Desember 2020.

D. Internet

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1994, *Perusahaan Kelompok*, Percetakan UGM, Jogjakarta.

Hukum Online, *Holding Company, Fungsi dan Pengaturannya*, 10 April 2013, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3562/holding-company--fungsi-dan-pengaturannya> Diakses Pada 11 Desember 2021.

RKN Media, “Kata Prof Dr. Sutan Remy Sjahdeini kerugian BUMN Bukan Merupakan Kerugian Negara”, <https://youtu.be/Qu1ulbkJw1g> diakses pada tanggal 25 Juni 2022.

Sulistiowati, 2013, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia*, Erlangga, Jakarta.

W. Riawan Tjandra, “Anak Perusahaan BUMN dan Penegakan Hukum Anti Korupsi”, Diakses melalui <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2017/05/Wirawan-Tjandra-Aspek-Hukum-Administrasi-Negara-dalam-Pembentukan-Holding-BUMN.pdf>.

W. Riawan Tjandra, “Anak Perusahaan BUMN dan Penegakan Hukum Anti Korupsi” diakses melalui <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2017/05/Wirawan-Tjandra-Aspek-Hukum-Administrasi-Negara-dalam-Pembentukan-Holding-BUMN.pdf>, pada tanggal 20 April 2020.

Yulwansyah & Partners Journal, “Tinjauan Hukum Mengenai Status Anak Perusahaan BUMN”, Diakses melalui *Artikel-Tinjauan-Hukum-Mengenai-Anak-Perusahaan-BUMN.pdf* pada tanggal 15 April 2022.